

Vol. 3 No. 2, Desember 2008

ISSN : 1978 - 1024

# **Widya Cendika**

**JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN**

**LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
DAN  
ASOSIASI PENELITI PENDIDIKAN INDONESIA  
(APPI)**

|                  |        |       |             |                           |                     |
|------------------|--------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|
| Jurnal<br>LitDik | Vol. 3 | No. 2 | Hal.103-195 | Surabaya<br>Desember 2008 | ISSN<br>1978 - 1024 |
|------------------|--------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|

# **WIDYA CENDIKA**

## **Jurnal Penelitian Pendidikan**

Jurnal ini terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, berisi artikel hasil penelitian pendidikan, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

**Ketua Penyunting**  
MV. Roesminingsih

**Wakil Ketua Penyunting**  
Suyono

**Dewan Penyunting**  
Ali Mufrodi (IAIN Sunan Ampel Surabaya)  
Zainuddin Maliki (Universitas Muhammadiyah Surabaya)  
Gempur Santoso (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)  
Sugimin Gitoasmoro (STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya)  
Bambang Yulianto (Universitas Negeri Surabaya)  
Ismet Basuki (Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia)  
Kisyani (Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya)

**Mitra Bestari**  
Muslimin Ibrahim (Universitas Negeri Surabaya)  
FX Sudarsono (Universitas Negeri Yogyakarta)

**Penyunting Pelaksana**  
Daryono  
Sumarno  
Rudiana Agustini  
Dwi Heru Sutjahjo  
Warih Handayaningrum  
Retnani  
Arik Susanti

**Pelaksana Tata Usaha**  
Sugiarto  
Agus Supriyanto  
Nugroho Hadi  
Parni

---

**Alamat Penerbit/Redaksi:** Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang Surabaya 60231  
Telp. 031-8280009, ps. 106/Fax. 031-8296260. Email: lemlitunesa@yahoo.com Website: WWW.lemlitunesa.ac.id

---

**Widya Cendika: Jurnal Penelitian Pendidikan** menerima sumbangan tulisan ilmiah hasil penelitian pendidikan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah yang masuk diedit oleh penyunting ahli/mitra bestari. Penyunting dapat mengubah tulisan sesuai dengan gaya selingkung jurnal ini tanpa mengubah isinya.

---

Jurnal ini diterbitkan oleh: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (APPI). Di cetak oleh: Unesa University Press Kampus Ketintang Surabaya. Untuk berlangganan atau mendapatkan jurnal ini dapat menghubungi redaksi dengan harga Rp 25.000,00/eks.

---

# **WIDYA CENDIKA**

## **Jurnal Penelitian Pendidikan**

### **Daftar Isi**

|                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nanik Estidarsani dan Suparji</b><br>Kompetensi Pedagogik dan Profesional Mahasiswa Calon Guru SMK Bidang Bangunan                                                                                             | <b>103 - 109</b> |
| <b>Darni, Soehartini, Poerweni Darmiati</b><br>Peningkatan Kualitas Apresiasi Sastra pada Mata Pelajaran Bahasa Daerah Kelas VII SMPN 2 Sidoarjo Melalui Asesmen Autentik                                         | <b>110 - 117</b> |
| <b>Muchlis</b><br>Peningkatan Kualitas "Kegiatan Simulasi" MKPBM II melalui Implementasi Perangkat Kimia SMA Beralur Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS dan Berorientasi Pendekatan Kontekstual               | <b>118 - 122</b> |
| <b>Muhaji</b><br>Pengembangan Modul Pembelajaran Termodinamika untuk Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin Otomotif Fakultas Teknik UNESA                                                                      | <b>123 - 131</b> |
| <b>Pudji Astuti dan Hj. Rr. Nanik, S</b><br>Sosialisasi Peserta Didik Tingkat Sekolah Dasar Al Hikmah Surabaya dengan adanya Penerapan Sistem Full Day School di Al Hikmah Surabaya                               | <b>132 - 140</b> |
| <b>Yoyok Yemiandhoko</b><br>Model CD Interaktif Untuk Media Pembelajaran Membaca Permulaan di Sekolah Dasar                                                                                                       | <b>141 - 150</b> |
| <b>Arifin Rahman, Tauran, Prasetyo I</b><br>Analisis Isu Pendidikan di dalam Pemilu 2004<br>(Analisis terhadap Platform dan Kampanye Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2004)                            | <b>151 - 160</b> |
| <b>Yusran Kapludin</b><br>Penerapan Pendekatan Konstruktivisme dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Fisiologi Hewan Mahasiswa Program Studi Biologi UNIDAR Ambon                                                   | <b>161 - 167</b> |
| <b>Rina Yuliani Dan Suyono</b><br>Penilaian Kinerja Siswa pada Praktikum Larutan Elektrolit dan Non-elektrolit melalui Implementasi Model Pembelajaran Induktif dalam Kegiatan Lesson Study SMA Negeri di Jombang | <b>168 - 184</b> |
| <b>Faridha Nurhayati, dkk</b><br>Penggunaan Multimedia dalam Model Pengajaran Langsung untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Ilmu Gizi Olahraga Mahasiswa D2-PGSD Penjas                                  | <b>185 - 195</b> |

## ANALISIS ISU PENDIDIKAN DI DALAM PEMILU 2004

(Analisis terhadap Platform dan Kampanye Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2004)

Arifin Rahman, Tauran, Prasetyo I

\* Dosen Fakultas Ilmu Sosial Unesa

**Abstract:** The objective of this research is to identify the issues taken up by political parties during the election period; to analyze the position of educational issues in the campaign; and to analyze the educational dimensions which were chosen as issues for the political parties' platform and campaign during the 2004 election. The value of this research is to determine the attitude of political parties towards educational issue and also to build an overview of the commitment and capability of political parties in carrying out their function as media for aggregation, articulation and political educational for the masses. This research is focused on the legislative election in 2004 and the subject of this research is six political parties, i.e. Golkar, PDIP, PKB, PPP, PKS and PAN. The data were gathered from relevant party documents such as profiles, articles of association, party platform, programs and others. Meanwhile, the data on the political promises made during the campaign were collected from the daily Kompas and weekly Tempo. The data were then analyzed using content analysis and textual analysis.

This research comes to the conclusion that: (1) the issues chosen by political parties during their campaign for the 2004 legislative election is heterogeneous and can be categorized into the following groups of topics: politics and governance, economy, social-cultural, health, agriculture and environment, law and education. (2) Education is one of the important issues for the political parties' platform and campaign. (3) The educational dimensions chosen by the political parties as issues in their platform and campaign can be categorized into the following dimensions: expanded and more equitable distribution of the opportunities to obtain quality education; improvement of the capability and assurance for the welfare of educators; reinvigoration and strengthening of education system; public participation in education; and educational budget. However, most parties did not explain in detail their strategy for achieving those objectives and how to measure the success in achievement. (4) most political parties had not carried out their function optimally, since these parties still showed the tendency to use the election as show of force rather than a chance to disclose their political platform. This research proposes the following recommendations: (1) political parties need to improve political education that they are communicating to the masses by using campaign as an opportunity to disclose their political platform, (2) Further studies should be conducted to investigate the methods used by political parties in formulating their political platform. This is important to understand the way political parties aggregate and articulate the aspiration of the masses.

**Kata Kunci:** isu-isu pendidikan, partai politik, pemilihan umum

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Pada masa pemilu, dengan berbagai cara partai politik akan berupaya mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari rakyat. Diantaranya menawarkan program-program dan janji politik dari platform yang mereka buat. Sebagaimana dinyatakan Putra (2004) bahwa pada masa pemilu partai politik akan memilih isu-isu publik dan mengeluarkan janji-janji politik untuk merebut hati rakyat. Secara normatif, isu dan program yang ditawarkan partai politik pada saat pemilu

merupakan cermin sikap politik partai yang akan diperjuangkan. Namun secara empirik hal tersebut masih terbuka untuk diperdebatkan.

Salah satu isu penting yang seringkali menjadi komoditas pemilu adalah isu pendidikan (Sirozi, 2005:17). Di Indonesia, menguatnya pendidikan sebagai salah satu isu politik dapat dilihat pasca keterpurukan Indonesia akibat krisis pada akhir 1990-an. Momentumnya adalah ketika dimuatnya ketentuan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja APBN/APBD dalam amandemen keempat UUD 1945 dan

UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keterpurukan Indonesia, yang pada tahun 2004 peringkat Human Development Indeksnya berada pada posisi ke-111, dianggap bersumber dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan. Tercatat, bahwa diantara negara-negara Asean lainnya, Indonesia adalah negara yang paling kecil dalam mengalokasikan anggaran belanja untuk sektor pendidikan.

Empat tahun sejak ditetapkan alokasi anggaran minimal bidang pendidikan di dalam konstitusi, implementasinya masih menemui kendala. Sebagian kalangan meragukan komitmen elit politik baik di eksekutif maupun di DPR di dalam merealisasikan amanat tersebut. Menurut pendekatan pluralis dalam studi kebijakan publik (Parson, 2005:137-147) fenomena belum terimplementasikannya amanat konstitusi terhadap bidang pendidikan dapat dijelaskan dengan menelusuri sikap politik berbagai kelompok yang terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan APBN. Aktor yang dominan dalam hal ini adalah partai politik.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka analisis terhadap sikap dan pilihan isu yang diangkat partai politik menjadi relevan untuk dikaji. Pentingnya kajian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang sikap dan prioritas pilihan isu dari partai politik di dalam merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat, utamanya pendidikan. Lebih luas, penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran terhadap kemampuan partai politik di dalam menjalankan fungsinya sebagai media agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat, serta sebagai media pendidikan politik bagi rakyat.

## 2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah isu-isu apa yang dipilih partai politik pada masa kampanye pemilu legislatif 2004? Bagaimana posisi pendidikan di dalam isu kampanye partai politik pada pemilu 2004? Dimensi-dimensi apa dari isu pendidikan yang dipilih partai politik di dalam platform dan kampanye pada pemilu 2004?

## 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi isu-isu yang dipilih partai politik pada masa kampanye pemilu legislatif 2004. Penelitian ini juga akan menganalisis posisi pendidikan di dalam isu kampanye partai politik pada pemilu 2004. Selanjutnya penelitian ini hendak menganalisis dimensi-dimensi isu pendidikan yang dipilih partai politik di dalam platform dan kampanye pada pemilu 2004.

## 4. Manfaat Penelitian

Secara khusus penelitian ini akan menghasilkan informasi tentang isu-isu yang dipilih partai politik di dalam kampanye pemilu 2004; informasi tentang posisi isu pendidikan di dalam kampanye partai politik; informasi tentang dimensi-dimensi isu pendidikan yang dipilih partai politik di dalam platform dan kampanye partai politik. Secara umum, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kemampuan partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai media agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat, serta sebagai media pendidikan politik bagi rakyat.

## B. Tinjauan Pustaka

Surbakti (1992:116) mendefinisikan partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapih dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan publik yang mereka susun. Fungsi partai politik, yaitu; pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi dan pendidikan politik, sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. Platform politik, yakni *the party's underlying value system* atau *a statement of principles, goals, and programs developed and supported by a political party and its candidates* (McNair, Paulson, dalam Suryadi, 2005).

Sedangkan kampanye adalah kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Calon

anggota DPR dan DPRD untuk meyakinkan para pemilih bukan anggota untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan program-program partai melalui media massa, di ruang terbuka atau gedung pertemuan pada masa dan waktu yang ditetapkan oleh KPU. Materi yang disampaikan di dalam kampanye meliputi agenda kebijakan yang akan diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya.

Adapun isu (publik) adalah "*controversial public problems*". Selanjutnya isu (publik) yang mendapat keprihatinan banyak orang akan berubah menjadi item agenda kebijakan (Islamy, 2003). Dalam studi kebijakan, sistem demokratis mengandaikan bahwa setiap kebijakan publik yang keluar dari *black box* sistem politik adalah sebuah fungsi dari hal-hal yang masuk di dalamnya (Parsons, 2005 : 127). Dalam pandangan pluralis, semua pihak bisa mempengaruhi agenda kebijakan dan partai politik merupakan komponen pentingnya.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tekstual. Fokus penelitian ini adalah pemilu 2004, sedangkan subjeknya adalah 6 partai politik yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, PKS dan PAN. Adapun unit analisis penelitian ini adalah perkataan, pernyataan, atau kalimat dari dokumen platform dan berita kampanye partai politik (Stempel, 1988).

Data dikumpulkan dari dokumen-dokumen partai yang berkaitan dengan platform partai seperti profil, AD/ART, program kerja, dan lainnya. Sumber data diperoleh dari dokumentasi yang dibuat oleh Tim Litbang Kompas yang bersumber dari KPU. Untuk memperkuat sekaligus proses *re-checking* data maka penelitian ini juga menggunakan informasi dari web site resmi partai politik. Sedangkan data tentang janji politik selama masa kampanye 11 Maret hingga 2 April 2004, dikumpulkan dari sumber Koran Kompas dan Majalah Minggu Tempo.

### D. Hasil Dan Pembahasan

Pemilu 2004 diikuti 24 partai politik. Dari semua parpol peserta pemilu, sebagian parpol dianggap memiliki asal-usul yang bisa ditelusuri sampai ke partai angkatan pertama sebelum tahun 1950an. Sebagian lagi bisa dianggap memiliki hubungan emosional dengan parpol terdahulu yang tidak dengan sendirinya memegang mandat untuk melanjutkan parpol itu. Selebihnya, sekitar 25% adalah parpol baru dari angkatan baru dengan pemikiran politik baru. Jumlah pemilih 148.000.369 dan jumlah TPS-nya 579.901.

#### 1. Isu-Isu yang Dipilih Partai Politik pada Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2004

##### a. Isu politik dan Pemerintahan

Secara umum partai politik yang ada menjual isu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Golkar memilih isu stabilitas pemerintahan dan isu otonomi daerah. Golkar juga mengangkat isu otonomi daerah dengan mengeksploitasi kekurangan-kekurangan otonomi daerah dan menawarkan perbaikan-perbaikannya. PDIP memilih isu-isu seperti penguatan kedaulatan politik negara, stabilitas politik, demokratisasi, optimalisasi pengelolaan potensi daerah, pemerintahan yang bersih dari KKN, peningkatan kesejahteraan pegawai dan perbaikan sistem pengawasan pegawai negeri. Sama halnya dengan Golkar, sebagai partai dengan suara terbesar di Parlemen sementara ini, stabilitas politik merupakan isu yang dijanjikan PDIP. PKB memilih isu demokrasi tanpa korupsi. Isu ini nampaknya diangkat sebagai respon dan upaya meraih simpati sebagian masyarakat yang kecewa terhadap implikasi negatif dari euforia demokrasi yang ada. PPP memilih isu penguatan prakarsa pertahanan dan keamanan swakarsa dari rakyat melalui wajib bela negara dan pemerintahan yang berorientasi kerakyatan dan demokrasi. PKS memilih isu pemerintahan yang bersih dan peduli pada persoalan rakyat serta isu kebijakan luar negeri yang berbasis kepada kepentingan perekonomian nasional. Isu ini

dipilih untuk merespon kebosanan dan rasa frustrasi di sebagian masyarakat terhadap penyakit korupsi dan kolusi di pemerintahan. PAN memilih isu meneruskan komitmen menyelesaikan reformasi dan penempatan TNI dan Polri di bawah kontrol publik.

**b. Isu Ekonomi**

Golkar memilih isu stabilitas perekonomian, menekan angka pengangguran dan PHK, pemberantasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat. isu stabilitas perekonomian dipilih nampaknya memanfaatkan romantisme sebagian masyarakat terhadap kondisi perekonomian-an sebelum krisis ekonomi terjadi di Indonesia, yang mana pada saat itu Golkar merupakan partai dari rejim yang berkuasa. Sedangkan isu kemiskinan dan pengangguran merupakan komoditas politik yang juga penting di dalam menarik simpati rakyat. PDIP memilih isu pembenahan ekonomi diantaranya menjual isu perekonomian yang anti neoliberalisme. PKB memilih isu peningkatan pendapatan perkapita. Sedangkan PPP memilih isu penanganan yang cepat terhadap krisis. PKS memilih isu anti utang luar negeri dan penyelesaian utang luar negeri dalam waktu singkat. Isu ini dipilih nampaknya untuk merespon dari keterbatasan kemampuan negara di dalam pembiayaan pembangunan sebagai akibat banyaknya alokasi anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar hutang luar negeri. Sedangkan PAN memilih isu penanganan pengangguran, penanganan mahalnya harga kebutuhan pokok serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

**c. Isu Hukum**

Yang menarik untuk isu hukum dalam penelitian tidak ada partai yang menawarkan program-program kongkrit pada saat kampanye. PKB dan PAN yang teridentifikasi mengangkat isu ini hanya menawarkan program yang umum seperti

memilih isu penegakan supremasi hukum dan penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan RI. Tidak teridentifikasi partai yang menawarkan penyelesaian hukum terhadap para "penjahat" BLBI yang merupakan kasus terbesar era reformasi dan merugikan negara secara berkelanjutan. Padahal upaya penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi harus segera dituntaskan dalam rangka memperkuat basis pembangunan yang berkelanjutan.

**d. Isu Sosial Budaya**

Di dalam isu ini semua partai menjual isu yang sama yaitu pemberantasan budaya KKN. Namun untuk partai-partai seperti PKB dan PPP selain menjual isu pemberantasan budaya dan perilaku KKN juga menjual isu seperti "islam yang sejuk", "islam universal" dan pengembangan budaya lokal untuk pembangunan kebangsaan. Demikian halnya dengan PKS, partai ini juga mengangkat isu nasionalisme di dalam kampanyenya.

**e. Isu Kesehatan**

Untuk isu kesehatan, dalam penelitian ini hanya Golkar, PKB dan PAN yang teridentifikasi mengangkat isu ini. Golkar dan PKB memilih isu peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan PAN memilih isu menaikkan anggaran kesehatan.

**f. Isu Pertanian dan Lingkungan Hidup**

Untuk isu pertanian dan lingkungan, dalam penelitian ini hanya Golkar dan PDIP yang teridentifikasi. Golkar memilih isu perbaikan sektor pertanian dengan memperbaiki permasalahan harga pupuk dan gabah. Sedangkan PDIP memilih isu penanggulangan kerusakan hutan. Isu ini nampaknya merespon kasus-kasus maraknya penjarahan hutan dalam bentuk pembalakan liar yang mengakibatkan kerusakan ekosistem di hutan dan lingkungan sekitar hutan.

g. Pendidikan

Semua partai yang menjadi fokus kajian mengangkat isu pendidikan baik di dalam platform politiknya maupun di dalam kampanye pemilu. Secara detil bagaimana pendidikan diposisikan di dalam program politik mereka akan dibahas dalam sub bahasan selanjutnya (4.2.).

**2. Posisi Pendidikan di dalam Isu Kampanye Partai Politik pada Pemilu 2004**

Dari hasil identifikasi seperti diungkap dalam hasil di atas, dapat dilihat bahwa isu yang dipilih partai politik sangat beragam. Dilihat dari keseluruhan isu yang ditampilkan, pendidikan bukanlah isu pertama yang menjadi pilihan dari partai peserta pemilu. Sebagian besar partai memang menempatkan pendidikan sebagai isu penting, namun posisi isu pendidikan secara relatif masih berada di bawah isu politik, ekonomi dan hukum.

Di dalam kampanyenya tentang pendidikan, partai mengangkat berbagai isu seperti Golkar memilih isu peningkatan anggaran pendidikan dan peningkatan gaji guru. PKB memilih isu peningkatan derajat pendidikan masyarakat, pendidikan gratis untuk orang miskin. PPP memilih isu otonomi pendidikan di daerah, pendidikan dan krisis multidimensi, peningkatan anggaran pendidikan sebesar 40%, peningkatan gaji guru. PAN memilih isu penanganan mahalannya ongkos pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Umumnya isu yang diangkat dalam kampanye terkait dengan apa yang sudah digariskan di dalam platform. Hanya Golkar yang tidak nampak jelas bagaimana sikap sesungguhnya terhadap bidang pendidikan. Hal ini disebabkan meskipun di dalam kampanye Golkar mengangkat isu peningkatan anggaran pendidikan dan peningkatan gaji guru, namun Golkar tidak menampilkan secara jelas program-program tersebut atau program-program yang terkait isu pendidikan di dalam platform politiknya.

**3. Dimensi Isu Pendidikan yang Dipilih Partai Politik di dalam Platform dan Kampanye Pemilu 2004**

a. Dimensi Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu.

Isu ini muncul karena masih terdapatnya kendala-kendala pada sebagian rakyat untuk mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan dasar. Apalagi jika tuntutananya ditingkatkan pada ketersediaan pendidikan yang bermutu. Menyikapi persoalan persoalan ini PDIP memilih isu wajib belajar gratis sembilan tahun. PKB memilih isu pemerataan pendidikan dan pendidikan murah. Isu ini juga secara konsisten diangkat di dalam kampanye pada masa pemilu dengan mengangkat isu Pendidikan Gratis untuk orang miskin. Sedangkan PPP memilih isu penuntasan wajib belajar disertai batasan waktu yaitu dalam lima tahun ke depan; pembebasan pungutan dana di dalam pelaksanaan wajib belajar; memperhatikan anak berprestasi dari keluarga tidak mampu; menggalakkan pendidikan untuk semua; dan isu pendidikan seumur hidup. PKS memilih isu memperkokoh penyelenggaraan wajib belajar melalui mobilisasi fasilitas fisik serta meningkatkan motivasi pendidikan di kalangan masyarakat. Sedangkan PAN memilih isu penerapan wajib belajar untuk semua anak usia sekolah. Kemudian di dalam masa kampanye pemilu, PAN mengangkat isu penanganan mahalannya ongkos pendidikan.

Di dalam isu pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan titik tekan isu yang diambil partai politik relatif seragam, yaitu penuntasan wajib belajar. Yang menarik adalah isu yang dipilih PPP yang memberikan indikator waktu di dalam isu yang mereka sampaikan, yaitu penuntasan wajib belajar dalam lima tahun.

b. Dimensi Peningkatan kemampuan akademik dan profesional serta jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan

Isu kemampuan profesional dan jaminan kesejahteraan tenaga kepen-

didikan merupakan isu yang menarik. Perkara pro-fesionalisme dan kesejahteraan seringkali diperdebatkan didalam konteks kausalitas. Sebagian kalangan menganggap bahwa kesejahteraan akan menciptakan guru yang profesional, sedangkan sebagian lagi menganggap bahwa profesionalitas tidak ditentukan oleh kesejahteraan bahkan, profesionalitas itulah yang akan membuat kesejahteraan itu akhirnya muncul. Menyikapi persoalan ini PDIP mengangkat isu kesejahteraan guru. PKB mengangkat isu lebih luas dari sekedar mengangkat kesejahteraan guru yaitu meningkatkan kesejahteraan para pendidik dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. PPP memperjuangkan peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik. Pada masa kampanye PPP mengangkat isu peningkatan gaji guru. Isu ini juga disampaikan Partai Golkar pada masa kampanye meskipun di dalam platformnya tidak dijelaskan. Sedangkan PKS mengangkat isu peningkatan profesionalitas dan integritas guru, serta meningkatkan penghargaan terhadap guru.

c. Pembaharuan dan pementapan sistem pendidikan.

Merespon isu ini PDIP mengangkat isu peningkatan mutu pendidikan, memperbanyak pendidikan kejuruan di tingkat sekolah menengah dan pendidikan non formal dalam program "kerja sambil belajar". PKB mengangkat isu peningkatan mutu pendidikan, pembaharuan model pembelajaran, pemberdayaan penyelenggaraan pendidikan, dan isu yang lebih luas yaitu pembentukan masyarakat beradab. PPP mengangkat isu mendorong peran lembaga-lembaga pendidikan yang menyiapkan SDM berkualitas, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa kampanye PPP mengangkat isu otonomi pendidikan di daerah, dan perhatinnya pada pendidikan dikaitkan dengan krisis multidimensi. Sedangkan PKS mengangkat isu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan

dengan kebutuhan industri dan ekonomi. Adapun PAN mengangkat isu penciptaan sistem pendidikan yang merangsang tumbuhnya akhlak yang baik dan merangsang kemandiria intelektual dan akademisi serta kreativitas, mendorong pemanfaatan penyebaran informasi bagi peningkatan pendidikan di daerah, mendorong penelitian ilmiah dan mencegah penyalahgunaannya yang merusak umat manusia. Pada masa kampanye PAN mengangkat isu peningkatan kualitas pendidikan.

Secara umum semua partai sepakat perlunya peningkatan mutu sistem pendidikan. Isu relevansi diangkat oleh PDIP dan PKS yang menekankan pada relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Nampaknya kedua partai ini memiliki pandangan yang lebih pragmatis terhadap fungsi sistem pendidikan. Namun untuk PKS mereka juga menekankan pendidikan sebagai alat menuju pembentukan *insan kamil* yaitu manusia yang utuh dan paripurna. Isu dengan corak humanis ditampilkan oleh PAN dan PKB yang mengangkat isu pembangunan sistem pendidikan yang merangsang tumbuhnya akhlak yang baik dan pembentukan masyarakat yang beradab. Namun PKB dengan lebih jelas mengangkat isu-isu pada perombakan total terhadap kurikulum nasional, peningkatan profesionalisme guru/pengajar, manajemen dan desentralisasi pendidikan, peningkatan mutu sarana dan prasarana, sampai dengan isu pengembangan *research university*.

d. Pemberdayaan dan Partisipasi keluarga dan masyarakat

Isu pemberdayaan dan partisipasi keluarga dan masyarakat berkembang dari pemahaman bahwa pendidikan sesungguhnya bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah. Namun demikian, isu ini juga tentunya sulit dilepaskan dengan kecenderungan di tingkat global seperti yang dinyatakan Dale

(2002) bahwa telah terjadi kecenderungan dikurangnya peranan pemerintah tetapi menambah peranan unsur swasta dan masyarakat untuk membiayai pendidikan sebagai akibat politik neoliberalisme. Merespon isu ini, PKB memilih isu mendorong partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengembangan model *outsourcing*. PKS memilih isu mobilisasi sarana fisik serta meningkatkan motivasi pendidikan di kalangan masyarakat. Adapun PPP, PDIP dan PAN tidak teridentifikasi pilihan dan sikap mereka terhadap isu ini.

e. Anggaran pendidikan

Isu anggaran pendidikan menjadi penting ketika amandemen keempat UUD 1945 mencantumkan ketentuan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD. Merespon isu ini PDIP mengangkat isu mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan. Golkar, meskipun tidak dijelaskan di dalam platform politiknya, mengangkat isu peningkatan anggaran pendidikan pada masa kampanye pemilu. PKS mengangkat isu pelaksanaan alokasi anggaran 20%, bahkan PKS mengembangkan perspektif yang lebih luas berkaitan dengan perosalan pembiayaan pendidikan. PKS menawarkan pemanfaatan alternatif sumber dana dengan memanfaatkan royalti dari sektor pertambangan dan eksplorasi sumber daya alam dan dana-dana non anggaran yang bertebaran di beberapa pos strategis. Selain itu PKS juga menawarkan model penyelenggaraan pendidikan pola kerakyatan yang murah dan berkualitas, berstandar jika pemerintah masih kesulitan dengan pembiayaan pendidikan. Adapun PAN mengangkat isu peningkatan alokasi dana pendidikan untuk membebaskan peserta didik dari pungutan yang memberatkan. PKB mengangkat isu peningkatan anggaran pendidikan 20%-30% dari APBN. PPP tidak menjelaskan secara eksplisit dari platformnya yang membahas tentang isu anggaran, namun

pada saat kampanye pemilu, PPP menyampaikan isu yang sangat bombastis yaitu peningkatan anggaran pendidikan sebesar 40%.

#### 4. Inferensi

Surbakti (1992:122) mengklasifikasi-kategori partai politik menjadi tiga tipe, yaitu partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. Jika melihat platform politik yang ditampilkan, sulit untuk mengklasifikasi partai-partai yang ada ke dalam klasifikasi yang dibuat oleh Surbakti secara ketat. Mereka mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Namun demikian untuk kasus PPP, PKS, PKB dan PAN, selain menampilkan ciri-ciri partai pragmatis juga nampak ciri-ciri partai ideologi Islam. Namun demikian dari keempat partai tersebut hanya PPP dan PKS yang secara terbuka menyatakan berasaskan Islam.

Pemilu 2004 menunjukkan sebagian besar partai politik belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Partai politik masih menempatkan kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan (*show of forces*) ketimbang wahana penyampaian wacana politik dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakberfungsian partai politik, dalam hal ini fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik tidak berjalan. Peran kampanye sebagai media untuk membedah platform partai, nampaknya tidak terlalu efektif. Peran kampanye tidak terlalu penting untuk menaikkan perolehan suara dan sebatas media konsolidasi basis dukungan yang sudah ada sebelumnya. Nampaknya partai politik memahami kondisi ini. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan parpol pada masa kampanye. Seperti Golkar yang tidak terlalu agresif melakukan adu program.

Model kampanye yang tidak mengutamakan adu program juga dilakukan oleh PKS. Cara kader PKS menyosialisasi program partai juga menarik dan beragam. Mereka, misalnya, memberikan pendidikan kepada petani dan aktif terjun membantu daerah yang

sedang tertimpa bencana jauh hari sebelum masa kampanye pemilu. Lain lagi dengan yang dilakukan oleh PDIP yang cukup jeli melihat situasi. Di tengah kritik keras kepada pemerintah Megawati, PDIP mengangkat tema kampanye yang ringan dan sederhana: "Pilih Moncong Putih." Cara ini terbukti mampu menanamkan ingatan kepada publik terhadap pesan iklan moncong putih hanya dalam waktu tiga pekan kampanye.

Secara umum penelitian ini melihat keberadaan platform partai politik yang ada belum berfungsi secara efektif. Peneliti lebih melihat bahwa ketidakfungsionalan tersebut disebabkan oleh faktor konstituen sendiri yang tidak kritis terhadap platform partai. Sebagian besar konstituen membuat pilihan ketika pemilu tidak didasarkan atas pertimbangan pengetahuannya tentang platform partai tetapi lebih ditentukan oleh alasan-alasan yang lainnya. Kurang efektifnya platform di dalam konteks pemilih di Indonesia saat ini nampaknya disadari betul oleh partai yang paling berpengalaman yaitu partai Golkar. Indikator utama penilaian ini adalah dari kurang tertariknya Golkar di dalam menjelaskan platform politiknya ke dalam program-program yang detil sebagaimana dilakukan oleh partai-partai yang lain. Di dalam platform politiknya hampir semua aspek diklaim oleh Golkar diperhatikan dan diperjuangkan. Namun janji tersebut sengaja tidak dijelaskan secara kongkrit ke dalam program-program politik. Hanya pada masa kampanye saja juru kampanye Golkar mengeluarkan janji-janji politik yang lebih spesifik.

Untuk platform bidang pendidikan, penelitian ini melihat bahwa secara umum, partai telah menempatkan bidang pendidikan sebagai isu penting di dalam pilihan isu kampanye. Artinya partai memang menyadari bahwa pendidikan merupakan isu yang secara normatif perlu diperjuangkan dan dianggap penting oleh rakyat sehingga memungkinkan rakyat memberikan dukungan suaranya. Namun secara empirik hal tersebut masih perlu dikritisi. Secara ideologis, tidak ada partai yang memiliki platform yang berbeda secara fundamental.

Meskipun demikian kekurangan dari platform tersebut adalah masih terlalu umum, sehingga sulit untuk mengikuti langkah-langkah dari platform yang akan dijalankan, prioritasnya apa dan berapa lama periode waktunya. Namun demikian, dari partai-partai yang ada, PKB dan PKS nampak memiliki platform bidang pendidikan yang lebih jelas dibandingkan partai lain. Di dalam platformnya mereka mengurai peta masalah pendidikan, kemudian menawarkan program-program politiknya.

Baik di dalam platform maupun di dalam masa kampanye, isu pendidikan memang digunakan oleh partai politik di dalam menarik simpati rakyat. Namun sayangnya, konsistensi dan komitmen partai untuk menjalankan platform politik tersebut tidak meyakinkan. Partai politik membuat platform politik di bidang pendidikan dengan menunjukkan bahwa mereka akan tampil melakukan perbaikan dan reformasi pendidikan dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang sebelumnya ada. Mereka menjanjikan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang padahal pada masa yang sama mereka memiliki otoritas untuk melakukan perubahan. Partai Golkar, PDIP, PPP, PKB, PKS, dan PAN merupakan sekumpulan partai pemilik 90,69% kursi di parlemen pada periode 1999-2004. Mereka memegang peranan di parlemen dan eksekutif. Kebijakan pendidikan yang mereka kritik sesungguhnya adalah produk dari mereka sendiri.

## E. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

- a. Isu-isu yang dipilih partai politik di dalam kampanye pemilu legislatif 2004 sangat beragam, setidaknya dapat dikategorisasikan ke dalam: isu politik dan pemerintahan, isu ekonomi, isu sosial budaya, isu kesehatan, isu pertanian dan lingkungan hidup, isu hukum, dan isu pendidikan. Posisi isu pendidikan berada pada isu penting kampanye terkait dengan platform politik mereka yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu agenda yang secara normatif akan diperjuangkan partai.

- b. Dimensi pendidikan yang dipilih partai politik menjadi isu di dalam platform dan kampanye pada pemilu 2004 dapat dikategorisasikan ke dalam beberapa dimensi yaitu: perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu; peningkatan kemampuan akademik dan professional serta jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan; pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan; pemberdayaan dan partisipasi keluarga dan masyarakat; anggaran pendidikan.
- c. Sebagian besar partai belum menjelaskan secara detil strategi pencapaian dan ukuran keberhasilan dari platform politik yang mereka janjikan. Partai politik masih menempatkan kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan (*show of forces*) ketimbang wahana membedah program-program di dalam platform dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat. Namun demikian, diantara partai yang ada, PKB dan PKS memiliki platform pendidikan yang relatif lebih baik daripada 4 partai lainnya.
- d. Konsistensi partai terhadap platform politiknya tidak meyakinkan. Pada pemilu 2004, partai-partai yang menjanjikan akan melakukan perbaikan dan reformasi pendidikan merupakan pemegang kursi dominan di parlemen sebelumnya. Dengan kata lain, untuk meraih dukungan mereka mengkritik kebijakan yang mereka buat sendiri untuk kemudian membuat janji-janji yang baru.

## 2. Saran

- a. Partai politik perlu mengoptimalkan fungsinya terutama sebagai media pendidikan politik yang mencerahkan publik dengan menggunakan kampanye sebagai media pembedahan dan akuntabilitas platform politik yang telah mereka susun.
- b. Perlunya upaya penyadaran terhadap masyarakat untuk lebih bertanggungjawab menggunakan hak pilihnya sehingga dapat menciptakan tatanan yang kondusif untuk memaksa partai konsistens terhadap janji-janji politiknya. Secara teknis, masyarakat dapat berpartisipasi menciptakan tatanan

yang kondusif dengan memberikan apresiasi kepada partai yang baik dan menghukum partai yang tidak baik dengan tidak memberikan dukungan pada saat pemilu.

- c. Perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang metode yang digunakan partai politik dalam menyusun platform politiknya. Hal ini penting untuk mengetahui cara-cara yang digunakan partai di dalam menjalankan fungsinya melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat.

## Daftar Pustaka

- Anonimus (2004). *Partai-Partai Politik Indonesia: Idiologi dan Program 2004-2009*. Jakarta, Penerbit Kompas.
- Budiarjo, Miriam (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Dale, Roger. (2002). *The State And The Governance Of Education: An Analysis Of The Restructuring Of The State-Education Relationship*. *Education Policy Journal*.
- Frey, Lawrence R. Et al (1992). *Interpreting Communication Research: A Case Study Approach*. NJ: Prentice Hall.
- Gazali, Effendi (2005). *Partai Politik : Sebuah Strategi Komunikasi Politik*. Kompas.
- Holsti, O.K. (1969). *Content Analysis For Social Sciences and Humanities*. Massachusset: Addison Wesley.
- Imron, Ali. (2002). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Klingemann, Hans-Dieter, Richard I. Hoffebert, dan Ian Budge. (2000). *Partai, Kebijakan, dan Demokrasi*. (Penterjemah Sigit Jatmika). Yogyakarta: Jentera dan Pustaka Pelajar.
- Lindkvist, Kent. (1981). *Approach to Tekstual Analysis dalam Rosengren, Karl Erik, Advances in Content Analysis*. CA: Sage Publication, hal 21-24.
- Nimmo, Dann. (2001). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek* (Penterjemah Tjun Surjaman), Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Parsons, Wayne (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Penterjemah Tri

- Wibowo Budi Santoso), Jakarta, Prenada Media.
- Putra, Fadilah (2003), *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sidi, Indra Djati. (2001). *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta, Paramadina dan Logos.
- Sirozi, M. (2005), *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Stempel, G.H. (1989). *Research Method in Mass Communication*, 2nd ed. Englewood Cliff, NJ: Prentice Hall.
- Thoha, Miftah (2004), *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Tilaar, H.A.R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perpektif Abad 21*. Jakarta, Tera Indonesia.
- UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik

#### Jurnal dan Makalah

- Jawa Pos Institut Pro Otonomi (2005), *Alokasi 20 Persen Anggaran Pendidikan dalam APBD: Jauh Panggang dari Api*.
- Jawa Pos Institut Pro Otonomi (2005), *Menguji Komitmen DPRD pada Anggaran Pendidikan Daerah: Di Sidoarjo, "Gaji" Dewan Justru Lebih Gemuk*.
- UNESCO, OECD, WEI Program. (2002). *Financing Education-Investments And Returns: Analysis Of The World Education Indicators*.

#### Majalah dan Koran

- Tempo No. 05/XXXIII/ 2004
- Tempo No. 06/XXXIII/ 2004
- Tempo No. 07/XXXIII/ 2004
- Suryadi, Karim (2005) *Pikiran Rakyat: Antara Roh dan Pragmatisme Partai Politik* Senin, 28 Maret 2005
- Koran Kompas tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April 2004